

## 596 Siswa SD Se-Kab. Tangerang Antusias Ikut O2SN 2023

**TANGERANG (IM)**- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Tangerang kembali digelar. Ratusan siswa sekolah dasar (SD) se-Kabupaten Tangerang antusias mengikuti kegiatan O2SN 2023 di SD Islam Citra Islami Citra Raya Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan tersebut melombakan sembilan cabang olahraga. Kesembilan cabang tersebut, yakni pencak silat, tenis meja, catur dan atletik kids, renang, bulutangkis, taekwondo, karate dan bola voli mini.

Ditandai dengan pelepasan balon udara, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yani Sutisna, membuka kompetisi olahraga antar-siswa jenjang SD tersebut.

Dia berharap kegiatan O2S menjadi ajang menyalurkan minat dan bakat siswa di Kabupaten Tangerang. "Mudah-mudahan dengan kegiatan O2SN ini dapat menjadi penyaluran bakat, minat, keterampilan sekaligus pengembangan dari anak-anak agar selain dapat hidup sehat, juga dapat meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga," katanya, Kamis (13/7).

Dalam konteks yang lebih makro lagi, Yani mengatakan kegiatan O2SN ini juga sebagai bagian dari sistem pembinaan olahraga yang bertujuan

untuk menjangkau bibit-bibit atlet berbakat dalam bidang olahraga, untuk dibina dan dikembangkan lebih terarah dan berkelanjutan menjadi atlet daerah.

Salah seorang siswa peserta kompetisi dari Cabang Olahraga (Cabor) Atletik Kids Wildan Arif Maulana, mengungkapkan antusiasnya dan tak sabar untuk segera bertanding di kompetisi tersebut.

"Tidak sabar pengen segera tanding supaya bisa mengukur sejauh mana kemampuan dan keterampilan yang telah saya latih. Karena persiapan untuk ikut kompetisi ini kami benar-benar berlatih dengan keras," ucap siswa SD Negeri Kosambi dalam 2, Kecamatan Mekar Baru.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kabupaten Tangerang, Fahrudin, menyebutkan O2SN tingkat SD dilaksanakan rutin setiap tahun, dan pada tahun ini dilaksanakan dalam dua hari yaitu tanggal 12-13 Juli 2023, bertempat di dua Lokasi yaitu SD Islam Citra Islami Citra Raya dan Sport Club Citra Raya.

"Peserta yang mengikuti O2SN tingkat SD pada tahun ini berjumlah 596 siswa, yang terdiri dari 320 putra dan 276 putri, baik dari sekolah negeri maupun swasta yang mewakili 29 kecamatan serta turut melibatkan 110 orang juri yang kompeten dan berpengalaman," pungkasnya. ● pp



### PELEPASAN PRODUK PERIKANAN DI SIDOARJO

(dari kiri ke kanan) Vice President Community Development Aruna Susi Susanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyio, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Perencanaan dan Pembangunan Joko Irianto, Program Manager CSR PT Astra International Tbk Dewi Paramita dan Plt. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perencanaan dan Pembangunan Chairul Saleh saling berbincang di sela-sela pelepasan 20 ton produk perikanan hasil tangkapan nelayan Desa Sejahtera Astra di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (13/7). Produk perikanan tersebut guna memenuhi kebutuhan industri pengolahan perikanan seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Papua.

## PPDB SMA 2023 di Banten Berakhir, Ombudsman: 5.000-an Kursi Kosong

Di Kabupaten Lebak ada 1.785 kursi kosong, Kab. Serang 1.382 kursi kosong, Kab. Tangerang 712 kursi kosong, Kab. Pandeglang 669 kursi kosong. Kemudian, Kota Serang 470 kursi kosong, Kota Cilegon 227 kursi kosong, Kota Tangerang Selatan 158 kursi kosong, dan Kota Tangerang 10 kursi kosong. Jadi totalnya di Banten ada 5.413 kursi kosong, kata Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Banten, Fadli Afriadi.

**SERANG (IM)**- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Banten telah berakhir. Ombudsman Perwakilan Banten mencatat total ada 5.413 kursi kosong di tahun ajaran 2023/2024 ini.

Ombudsman menunjukkan bahwa SMA di Kabupaten Lebak memiliki jumlah kursi kosong yang terbanyak," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Banten, Fadli Afriadi saat dikonfirmasi, Kamis (13/7). Kemudian, dia melanjutkan, kursi kosong banyak juga dilaporkan ada di kabupaten/

kota lain di Banten. Ia meminci kursi kosong di Kabupaten Lebak ada 1.785 kursi kosong, Kabupaten Serang 1.382 kursi kosong, Kabupaten Tangerang 712 kursi kosong, Kabupaten Pandeglang 669 kursi kosong, Kota Serang 470 kursi kosong, Kota Cilegon 227 kursi kosong, Kota Tangerang Selatan 158 kursi kosong, dan Kota Tangerang 10 kursi kosong. Total ada 5.413 kursi kosong.

"Jalur afirmasi merupakan penyumbang terbanyak kursi kosong pada PPDB SMA. Kami menduga jalur afirmasi yang paling banyak berkontribusi pada kursi kosong," katanya.

Ia mencontohkan, jika kuota afirmasi untuk 60 siswa, namun hanya lima hingga enam siswa yang diterima.

Lebih lanjut, Fadli menyatakan bahwa jika kuota jalur afirmasi masih menyisakan kursi, seharusnya kursi-kursi tersebut dialihkan ke jalur zonasi.

Ombudsman Banten san-

gat menyayangkan adanya kursi kosong dalam penerimaan siswa SMA Negeri. Ombudsman Banten berpendapat penerimaan siswa seharusnya merata dan tidak ada kursi yang tersisa, mengingat setiap sekolah memiliki kuota rombongan belajar yang telah ditetapkan. Saat ini, dia melanjutkan, Ombudsman sedang mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk menyelesaikan masalah kursi kosong ini.

"Kami berharap agar ribuan kursi kosong ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berpotensi melakukan praktik gratifikasi atau membuka jalur siluman dalam PPDB," katanya.

Fadli menambahkan, Ombudsman Banten juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara transparan menyampaikan kriteria dan mekanisme pengisian kursi-kursi ini agar PPDB dapat berjalan secara

objektif dan akuntabel.

PPDB 2023 jalur zonasi jenjang sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Banten termasuk Kota Tangerang, Banten, resmi ditutup pada pekan ini. Temuan menariknya, jarak terdekat calon peserta didik yang diterima di SMAN 1 Kota Tangerang hanya 51 meter, padahal lokasi sekolah di sekitar tempat bisnis, hotel dan Polresta Metro Tangerang Kota.

Salah satu petugas yang menyapu jalan di sekitar SMAN 1 Kota Tangerang, Karni mengakui tak ada rumah warga atau kontrakan di area sekitar salah satu sekolah favorit Kota Tangerang ini.

"Kalau di dekat SMA 1 Kota Tangerang tidak ada rumah warga atau kontrakan. Karena kalau di dekat sini hanya ada ruko tempat makan, bank, hotel, mini-market, kantor, atau Polres Metro Tangerang yang ada di seberang sekolah ini," ujar Karni. ● pra

## Serapan APBD Banten Rendah, Dewan Minta OPD Dievaluasi

**SERANG (IM)**- Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, Teuku Muhammad Zacky turut menyoroti terkait serapan belanja daerah Pemprov Banten yang masih rendah.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Banten, serapan anggaran per 12 Juli 2023, baru mencapai 40,75 persen.

Ia mengaku prihatin dengan rendahnya serapan belanja APBD Pemprov Banten tahun anggaran 2023 itu. Padahal, saat ini sudah memasuki semester II dan lima bulan lagi berganti tahun.

"Kita perhatikan akan rendahnya serapan APBD ini, tentu ini perlu dievaluasi," kata Zacky, Kamis (13/7). Zacky menilai rendahnya serapan anggaran menandakan akan tidak optimalnya Pemprov Banten dalam dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia pun meminta kepada Pemprov Banten dapat segera mengambil langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan serapan belanja dan mengoptimalkan anggaran yang telah disusun.

"Saat ini, Pemprov Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan serapan belanja mencapai target yang diharapkan. Hal ini penting agar pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Banten dapat berjalan optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujar Zacky.

Anggota Komisi I DPRD Banten tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga selisih antara realisasi pendapatan dan belanja agar tetap terkendali. Yang mana, realisasi pendapatan daerah pada bulan Juli ini baru mencapai 47,55 persen.

Ia menekankan bahwa efektivitas pengelolaan kas daerah harus dijaga dengan baik, sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma atau mengganggu.

"Selisih antara pendapatan dan belanja harus dikelola dengan efektif agar tidak ada kelebihan atau kekurangan anggaran yang signifikan. Pemprov Banten perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengelolaan keuangan agar serapan belanja dapat meningkat secara signifikan," tambah Zacky.

Dalam mengoptimalkan serapan belanja, Zacky mendorong Pemprov Banten untuk lebih memperhatikan sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, Zacky berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengadvokasi upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia berharap Pemprov Banten dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan serapan belanja meningkat dan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

"Kami berharap Pemprov Banten dapat mengarahkan anggaran yang tersedia untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat," pungkas Zacky. ● pra

## Bupati Tangerang Sampaikan 2 Raperda kepada DPRD

**TANGERANG (IM)**- Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar menyampaikan dua Raperda pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Tangerang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis, (13/7).

Dalam sambutannya Bupati Zaki mengatakan Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada rapat paripurna tersebut adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan. Bupati Zaki berharap kedua Raperda tersebut bisa segera dibahas dan nantinya dapat disahkan menjadi Perda Kabupaten Tangerang.

"Mudah-mudahan dua Raperda dari Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa segera dibahas dan bisa segera disahkan nanti menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang," harap Bupati Zaki. Menurut Bupati, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pembaharuan dari Perda sebelumnya dan juga merupakan penggabungan dari beberapa Perda yang dijadikan satu kesatuan.

"Ada beberapa Perda yang harus dijadikan satu karena sama semuanya, ngurusin pendapatan daerah baik itu melalui pajak maupun retribusi," tandasnya.

Bupati menambahkan Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tangerang.

"Kenapa Raperda ini dirasa penting terutama untuk perlindungan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, karena garis pantai Kabupaten Tangerang kurang

lebih sekitar 51 km. Tentunya banyak masyarakat yang berada di pinggir pantai yang bergantung penghidupannya terhadap hasil laut dan juga hasil perikanan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril mengatakan DPRD Kabupaten Tangerang juga menyampaikan penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda Kepemudaan.

"Terkait dengan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dirasa perlu, karena suatu kebutuhan prioritas dalam pembangunan di sektor pendidikan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang. Terkait dengan Raperda Kepemudaan diharapkan mampu menjadi pendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Tangerang," tandasnya. ● joh



Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar dan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail dalam sidang Paripurna.

## Terjaring Razia, 29 PMKS Dibawa ke Panti Rehabilitasi Dinsos

**TANGERANG (IM)**- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang melakukan razia terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tiga kecamatan.

Razia tersebut dilakukan pada pagi hari di Lampu Merah Tigaraksa, Pasar Cikupa, Gelam Jaya, Cilongok dan Lampu Merah Balaraja Timur. Sesi kedua dilakukan pada siang hari di wilayah Cisoloka, Pasirangka, Bundaran Bugel, dan Pom Bensin Bugel.

"Dalam razia tersebut diaman sebanyak 29 PMKS. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Panti Rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, kepada poskota.co.id, Kamis (13/7).

Razia tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman

dan nyaman kepada pengguna jalan. Kegiatan ini juga sebagai langkah meminimalisir atag gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis.

Fachrul berharap para PMKS yang sudah terjaring razia agar tidak kembali lagi ke jalan. Selain mengganggu para pengguna jalan, aktivitas PMKS ini juga membahayakan dirinya sendiri. "Upaya penertiban ini sebagai jembatana bagi para PMKS untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, Dinas Sosial akan merekomendasinya dengan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Tangerang," pungkasnya.

Diketahui, kegiatan ini terus dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang secara rutin untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang. ● pp



PAMERAN MANUFACTURING SURABAYA 2023

Pengunjung mengamati mesin yang dipamerkan di stan First Machinery Trade Co saat pameran Manufacturing Surabaya 2023 di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/7). First Machinery Trade Co memamerkan berbagai mesin industri Computerize Numerical Control (CNC) dalam pameran yang berlangsung sampai 15 Juli 2023.

## Provinsi Banten Masuk Daerah Zona Merah dalam Netralitas ASN

**SERANG (IM)**- Banten masuk dalam daerah zona merah dalam netralitas ASN. Hal itu diungkapkan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pangihutan Marpaung saat rapat koordinator pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten di aula kantor Bappeda, KP3B, Kamis (13/7).

Pangihutan menyebut ASN dinilai para politisi sebagai profesi yang seksi. "Banyak yang digoda, tapi ada juga yang menggoda," ujarnya. Apalagi, lanjutnya, dalam pasal 9 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN harus bebas dan pengaruh dari intervensi semua parpol.

Berdasarkan Pilkada 2020, ada 1.500 lebih ASN terbukti melanggar netralitas ASN. Untuk itu, perlu ada antisipasi karena Banten masuk daerah merah.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar

mengatakan, dalam waktu ke depan, Banten akan mengikuti hajat besar negara dalam rangka demokratisasi yakni melaksanakan Pemilu serentak.

Sebagai pemerintah daerah, Pemprov Banten sudah melakukan berbagai persiapan. Bahkan, Banten merupakan provinsi terdepan yang menyiapkan dana cadangan. "Banten menjadi satu-satunya daerah yang menyiapkan perda pencadangan dana, sehingga hal-hal yang perlu antisipasi agar semaksimal mungkin disiapkan untuk mempersembahkan kepada bangsa," tuturnya.

Terkait netralitas ASN, ia menegaskan, ada banyak ram-bu-rambu yang harus dipatuhi. Apalagi berdasarkan data pada Pilkada serentak ada ribuan ASN yang melanggar. "Kita pedomani agar tidak terjadi," tegasnya. Terlebih, lanjut Al, Banten masuk daerah merah yakni zona yang harus berhati-hati. "Peran saya untuk mengingatkan," ujarnya. ● pra